

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Karmasih, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Nuansa Cendekia.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Subyantoro, A., & Suwanto, F. X. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Penerbit Andi.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Wajdi, F. (2022). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Hendarsono, D. (2020). Manajemen pelayanan keamanan masyarakat berbasis IT guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat: Program Panic Button on hand polres Malang kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 108-117.
- Herawan, H., & Dai, R. M. (2021). Implementasi kebijakan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dalam pembuatan ktp el di kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 23-28.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85-100.
- Indrawan, J., & Ilmar, A. (2020). Kehadiran media baru (new media) dalam proses komunikasi politik. *Medium*, 8(1), 1-17.

- Ma'ruf, Z. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1793-1810.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324-334.
- Nagong, A. (2021). Studi tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota Samarinda Berdasarkan peraturan daerah kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105.
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1-16.
- Ngongoloy, V. R., kimbal, m., & Waworundeng, W. (2019). Implementasi kebijakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Manado dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Roring, A. D., Mantiri, M., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Saputra, R. (2020). Implementation Of Indonesian People's Representatives Policy on The Effectiveness Of Budget Management In Realizing Good Governance In The Corruption Eradication Commission Institution. *Journal of Advanced Research in Dynamical & Control Systems*, 12(02), 1493-1499.
- Sekarsari, R. W., & Suyeno, S. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan jalan antar kecamatan di Kabupaten Kediri. *JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan)*, 2(1), 12-25.
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 48-62.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112-133.
- Surbakti, F. E., & Abdilah, A. (2020). Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 146-158.
- Susanto, S. (2019). Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Problem Based Learning Pada Materi Pancasila Buddhis Dan Pancadhamma Pendidikan

Agama Buddha Kelas Vii Smp Di Kabupaten Pesawaran. Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK), 1(1), 50-67.

3. Skripsi

Basri, H. (2021). Analisis Implementasi Perencanaan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Fajar, M. B. L. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Lokasi Zona Merah Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Izzatsholekha, I. Z. (2021). Disertasi" Implementasi Kebijakan Perumahan Dan Permukiman di Kota Tangerang Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jakarta).

Lestari, E. P. (2015). Implemetasi kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan (studi pada pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Nurlian, F. (2021). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada dinas pendidikan provinsi jambi (Doctoral dissertation, Ilmu pemerintahan).

Oktaviana, N. (2019). *Implementasi program Adiwiyata mandiri dalam membentuk karakter peduli lingkungan di SMK Negeri 1 Turen* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Soetrijono, S. (2022). *Implementasi Community Policing Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Kota Banjarmasin* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

TITIN, V. (2022). *Analisis Pembelajaran Sejarah Dengan Model Problem Based Learning Siswa Kelas Xi Sma Indonesia Muda Sungai Raya* (Doctoral dissertation, IKIP PGRI PONTIANAK).

Wirdayanti (2021). Implementasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di kota Watampone Kabupaten Bone. (Bachelor Research. Muhammadiyah Makassar University).

4. Undang-Undang

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen.